

ABSTRAKSI

ZULFIKAR BACHTIAR – Opini Masyarakat Pasca Pemberitaan Berlakunya Perda Antirokok Di Surabaya Pada Harian Jawa Pos (Studi Deskriptif tentang Opini Masyarakat Pasca Pemberitaan Berlakunya Perda Antirokok Di Surabaya Pada Harian Jawa Pos)

Pemberitaan tentang berlakunya perda antirokok pada harian Jawa Pos pada 22 Oktober 2009 lalu melahirkan pro dan kontra dari masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya. Pemberitaan tersebut mengupas fakta yang sebenarnya, yakni tentang kebijakan yang harusnya terealisasi sesuai isi dalam perda belum semuanya terealisasi. Hal tersebut kaitannya dengan penyediaan infrastruktur dalam Kawasan Terbatas Merokok, yakni smoking Room. Lalu, bagaimanakah opini masyarakat Surabaya yang sebenarnya dalam menanggapi permasalahan tersebut? Apakah mereka mendukung wacana tersebut ataukah tidak mendukung?

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Stimulus Organism Response*. Inti dari teori tersebut untuk menentukan opini yang muncul dari masyarakat Surabaya setelah menerima, memperhatikan, dan mengerti stimulus berupa pesan yaitu berita tentang berlakunya perda antirokok pada harian Jawa Pos tersebut. Apakah yang muncul berupa opini positif, opini netral, ataukah opini negatif?

Responden penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang berusia 17-50 tahun. Keseluruhan tercatat sebanyak 1.783.257 jiwa. Untuk mengambil sampel 100 responden, digunakan teknik pengambilan sampel *Multistage Cluster Random Sampling* dalam penentuan wilayah. Setelah peng-cluster-an, didapatlah 8 kelurahan dari 4 kecamatan yang berada di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Timur sebagai subjek penelitian, yakni kelurahan wonorejo, kelurahan kedungdoro, kelurahan ketabang, kelurahan genteng, kelurahan kutasari, kelurahan kendangsari, kelurahan rungkut tengah, dan kelurahan gunung anyar.

Arah opini masyarakat yang didapat dari hasil jawaban kuesioner antara lain opini positif sebanyak 59%, opini netral 41%, dan opini negatif tidak ada sama sekali. Dapat diketahui bahwa mayoritas responden atau masyarakat yang membaca pemberitaan pada harian Jawa Pos tersebut memberikan opini yang positif.

Setelah penarikan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Surabaya memiliki opini positif yang artinya mereka mendukung pemberitaan tersebut dan tidak setuju terhadap pemberlakuan perda antirokok karena kebijakan yang seharusnya terealisasi belum semuanya bisa terealisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa merupakan suatu bidang kajian yang sangat kompleks. Media massa bukan berarti hanya satu variasi media yang menyajikan informasi kepada kelompok khalayak, tetapi khalayak juga menggunakan media massa dalam cara yang beragam. Dari media massa mereka mendapatkan informasi tentang berbagai hal dan peristiwa yang penting untuk mereka ketahui. Berbagai hal dan peristiwa yang dianggap penting tersebut disajikan dalam bentuk berita.

Diantara beberapa jenis media tersebut, media cetak seperti surat kabar memiliki ciri khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Surat kabar tidak hanya saja sebagai pencarian informasi yang utama dalam fungsinya, tetapi bisa juga mempunyai suatu karakteristik yang menarik yang perlu diperhatikan untuk memberikan analisis yang sangat kritis yang akan menumbuhkan motivasi, mendorong serta dapat mengembangkan pola pikir bagi masyarakat untuk semakin kritis dan selektif dalam menyikapi berita-berita yang ada di dalam media khususnya surat kabar. Namun tidak setiap informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Setiap informasi yang tidak memiliki nilai berita, menurut pandangan jurnalistik tidak layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan media

massa. Hanya informasi yang memiliki nilai berita atau memberi banyak manfaat kepada publik yang patut mendapat perhatian media. (Sumadiria, 2005 : 86).

Tidak setiap peristiwa dapat dijadikan berita, hanya berita yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu saja yang layak dan bisa disebut sebagai berita. Nilai berita tersebut menyediakan standar dan ukuran bagi wartawan sebagai kriteria dalam praktek kerja jurnalis. Sebuah peristiwa yang tidak mempunyai unsur nilai berita atau setidaknya nilai berita tidak besar akan dibuang.

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks yang menyortir (memilah-milah), menentukan peristiwa, dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Peristiwa harus dinilai terlebih dahulu, apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria nilai berita, nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas.

Berita di media massa seperti media cetak maupun media elektronik sangat beragam. Dan dalam surat kabar, berita utama dan aktual biasa diletakkan dan disajikan pada halaman pertamanya. Seperti pada pemberitaan yang disajikan Jawa Pos dalam halaman utama Metropolis tentang berlakunya Perda Antirokok. Dalam pemberitaan tersebut, Jawa pos selain menyajikan berita tentang dimulainya pemberlakuan perda antirokok di Surabaya, juga mengupas fakta dan realitas yang bertolak

yang ada dibalik proses pemberlakuan perda yang mulai dijalankan 22 Oktober 2009 lalu. Topik tersebut diangkat pada tanggal 22 Oktober 2009 kemarin, bersamaan dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Surabaya. Perlu diketahui, sebuah pemberitaan adalah buah dari suatu polemik (permasalahan) yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam pemberitaan itu disebutkan, bahwa Perda No. 5 Tahun 2008 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) mulai diberlakukan. Namun, meski sudah setahun disosialisasikan, Pemkot masih terlihat belum siap. Akibatnya penerapan perda antirokok itu dikhawatirkan tak berjalan mulus. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Esty Martiana Rachmie pun tampak pasrah setiap ditanya tentang kesiapan Surabaya menerapkan Perda Antirokok. Bahkan, dia terkesan pesimistis perda larangan merokok di sembarang tempat itu bisa berjalan mulus.

Hingga kini, dinkes memperkirakan kesiapan masyarakat metropolis dalam mengimplementasikan perda tersebut masih 70 persen. Tapi, bisa jadi kurang dari perkiraan itu. Menurut Esty, angka 70 persen itu terkait dengan penyediaan smoking room di kawasan terbatas merokok.

Terdapat dua hal pokok dalam perda tersebut. Pertama, warga metropolis sama sekali dilarang melakukan kegiatan yang bersentuhan

dengan rokok di kawasan-kawasan tertentu. Diantaranya, rumah sakit, sekolah, dan angkutan umum. Kedua, warga boleh merokok, namun hanya di ruangan tertentu. Misalnya, di mal, terminal, dan perkantoran.

Selama setahun sejak perda antirokok disahkan, dinkes menyatakan sudah melakukan sosialisasi secara optimal. Pengenalan kepada masyarakat itu dilakukan melalui bantuan LSM yang concern pada masalah kesehatan. Kenyataannya, penyediaan infrastruktur ruangan khusus merokok, baik di instansi pemerintah maupun swasta, hingga kini masih minim.

Sedangkan di institusi pendidikan dan kesehatan, larangan merokok sudah menjadi harga mati. Di dua lembaga itu, tidak akan dibangun ruangan khusus untuk merokok (smoking room). Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Sahudi menjelaskan, sebenarnya sejak lama peraturan dilarang merokok di sekolah diberlakukan. Namun, karena tidak ada landasan hukum yang jelas, masih ada guru-guru yang sedikit nakal. Sementara itu, rumah sakit (RS) maupun puskesmas tidak akan membangun ruangan khusus bagi perokok. Sebab, layanan kesehatan sejak lama ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR). Mereka memilih mengintensifkan pengawasan terhadap pengunjung yang masih sembunyi-sembunyi menyulut rokok.

Plt Kepala Satpol PP Arief Boediarto mengatakan akan bersosialisasi terlebih dahulu dalam menindak pelanggar perda antirokok. Arief

menjelaskan, berdasar koordinasi dengan dinas kesehatan (dinkes) selama enam bulan pertama, Pemkot cuma menegur mereka yang merokok di tempat yang dilarang. Enam bulan setelah sosialisasi, Arief berjanji memperketat penegakan perda. Sanksi administratif dan pidana mulai diberlakukan. Seperti termuat dalam perda, pelanggar dapat dikenai denda maksimal 50 juta rupiah atau pidana kurungan maksimal tiga bulan. Arief berharap pengawasan secara bertahap, mulai teguran sampai sanksi, bisa memberikan efek jera bagi pelanggar perda antirokok. Sehingga, masyarakat tidak perlu diawasi untuk tidak merokok di sembarang tempat. Dan pada intinya, mereka ingin melindungi perokok pasif dan menekan perokok pemula. (Jawa Pos Edisi 22 Oktober 2009).

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dinkes Kota Surabaya, Hariyanto, SKM mengatakan, banyak kendala yang harus dihadapi dalam menegakkan Perda No. 5 Tahun 2008 tersebut. Saat ini kendalanya adalah masih ada beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum menyediakan tempat merokok. Sehingga, dalam pelaksanaannya belum bisa dilakukan penindakan dengan alasan karena tidak ada ruangan khusus untuk merokok. Namun, masih banyak pegawai yang belum menerapkan aturan dalam Perda ini, meskipun SKPD tersebut telah memiliki ruangan khusus merokok. Samplingnya saat ini, SKPD yang sudah memiliki ruangan khusus merokok sebanyak 75%, dan 25% belum memiliki ruangan khusus merokok. Bagi yang belum menyediakan ruangan khusus

merokok itulah jika ada yang melanggar, maka yang terkena denda adalah penanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Sejatinya, penegakan perda itu seharusnya pada kantor SKPD terlebih dahulu, kemudian baru turun ke mall atau pusat perbelanjaan, tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang menjadi KTR dan KTM. Kendala lain yang ditemui oleh tim pelaksana Perda KTR dan KTM adalah pelaksanaan di angkutan umum. Meski pada saat diadakan operasi tidak ada yang merokok, tetapi di luar itu masih banyak yang berani merokok.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Surabaya dr. Sri Setiyani mengatakan, Tim Pemantau Perda KTR dan KTM telah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan yang terdapat di dalam Perda ini, salah satunya adalah sosialisasi yang ditujukan kepada beberapa elemen masyarakat, mulai dari pimpinan SKPD, Direktur Rumah Sakit, Rektor Universitas/Poltekkes, Kepala KUA, hingga pengelola jasa boga. Semua itu bertujuan agar informasi ini bisa sampai ke masyarakat, dengan harapan mereka bisa meneruskan sosialisasi ini pada masyarakat. Sosialisasi ini tidak langsung dilakukan ke masyarakat karena dikhawatirkan merubah *image* yakni mengambil hak orang lain untuk merokok. (<http://www.surabaya-ehealth.org/berita/evaluasi-pelaksanaan-perda-nomor-5-tahun-2008-tentang-kawasan-tanpa-rokok-dan-kaw.htm>).

Dalam realita masyarakat sendiri saat ini, pemberitaan tentang diberlakukannya perda antirokok tersebut menuai pro dan kontra. Bagi

mereka yang pro terhadap pemberitaan tersebut adalah mereka yang mayoritas merupakan para perokok. Mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan dengan diresmikannya perda mengenai larangan merokok di area publik, mereka hanya menginginkan adanya konsekuensi konkrit dari pemerintah sendiri terlebih dahulu. Yang dimaksudkan disini adalah andaikan perda tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai rancangan dan sanksi yang sudah ada (bagi para pelanggarnya), pemerintah setempat paling tidak mengadakan penyuluhan-penyuluhan terlebih dahulu dan telah menyiapkan tempat-tempat khusus bagi mereka (smoking area atau smoking room), sehingga tidak ada unsur dan pemikiran dari mereka bahwa hal itu sebuah penindasan bagi mereka ketika mereka melanggarnya dan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Sedangkan bagi mereka yang kontra terhadap pemberitaan tersebut adalah mereka yang minoritas merupakan para perokok pasif dan peduli terhadap kesehatan lingkungan sekitar. Mereka menyuarakan aspirasinya dan menginginkan Pemerintah Kota Surabaya untuk segera mendirikan sebuah Smoking Room atau Smoking Area bagi para perokok, sehingga para perokok tersebut tidak merusak kesehatan lingkungan di sekitarnya.

Berbicara tentang perda mengenai larangan merokok di area publik, perda itu sendiri mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Area yang dimaksud dalam

kawasan tanpa rokok yakni sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Sedangkan Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus. Dan area yang dimaksud dalam kawasan terbatas merokok yakni tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

Sesuai yang tertera pada Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, perda itu sendiri dibuat dengan pertimbangan, antara lain :

- a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surabaya, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.
- b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ tanggal 17 April 2008 perihal Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan Larangan Merokok di tempat Umum dan Ruang Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

(Salinan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok).

Maka dari itulah, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Seperti yang diketahui, rokok adalah benda beracun yang memberi sugesti berupa efek santai dan merasa lebih jantan. Rokok mengandung kurang lebih 4000 elemen-elemen, dan setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen, dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Pada kenyataannya, di tiap kemasan rokok telah disisipkan sebuah kalimat yang menjelaskan bahaya dari akibat merokok, yakni “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”, namun tak banyak perokok yang peduli tentang bahaya tersebut. Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan kecanduan, disamping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema. Selain itu, terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang di sekitar perokok yang bukan perokok.

Tidak hanya menghasilkan ‘racun’ bagi penikmatnya tetapi juga meracuni orang di sekitarnya. Itulah gambaran tentang benda kecil bernama rokok. Rokok, disukai banyak orang namun dimusuhi lebih banyak orang, itulah benda kecil bernama rokok. Sekelompok orang yang menikmatinya, namun orang lain yang sama sekali tidak menikmatinya juga ikut terkena dampaknya. Kelompok yang hanya bagian asap inilah dinamakan perokok pasif.

Tidak tanggung-tanggung, asap rokok mengandung sekitar 4000 bahan kimia, dan 43 diantaranya bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Ironisnya, asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif kandungan bahan kimianya lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihirup oleh perokoknya.

Merokok, menghasilkan pembakaran dan asap yang dihirup oleh si perokok, dan lalu dihembuskan ke udara. Asap yang dihembuskan dan asap hasil pembakaran ujung rokok kemudian menyebar ke udara dan dihirup oleh orang-orang yang tidak merokok.

Tidak banyak yang mau peduli dengan kenyataan bahwa 85% asap rokok dihirup oleh perokok pasif. Hanya 15% yang dihirup oleh perokoknya. Hitungan matematis yang cukup menyedihkan.

Menjadi pengguna fasilitas umum, terutama angkutan umum semakin menyempurnakan penyebaran bahaya ini. Asap rokok menjadi sesuatu yang nyaris tak dapat dihindari. Orang yang tidak merokok pun tidak lagi punya hak atas udara bersih untuk mereka hirup. Pasalnya, ada salah kaprah yang sudah membudaya. Misalnya, bila seseorang yang tidak merokok mengeluh akan asap rokok dalam sebuah bis kota, orang tersebut akan dianggap aneh. Padahal, di fasilitas umum yang berlaku seharusnya adalah peraturan untuk kepentingan umum.

Sebuah penelitian di Amerika memperkuat fakta bahwa perokok pasif memiliki risiko terkena penyakit lebih tinggi dibandingkan dengan perokoknya sendiri. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kematian akibat asap rokok pada orang yang tinggal dengan perokok lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Dengan menjadi seorang perokok pasif, beberapa bahaya mengintai kapan saja. Infeksi paru, gangguan pertumbuhan paru, bahkan kanker paru.

Di negara maju, persentase jumlah perokok semakin hari semakin berkurang. Selain kepedulian terhadap lingkungan, kesadaran yang tinggi akan bahaya rokok menjadi alasan kuat mereka untuk berhenti merokok.

Di Indonesia sendiri, para perokok masih memiliki kebebasan yang hampir tak terbatas. Memang, beberapa waktu yang lalu sudah ada Perda (untuk wilayah DKI) yang mengatur masalah merokok di area publik. Tetapi, tampaknya belum banyak perokok yang memiliki kesadaran pada peraturan tersebut. Kawasan khusus bagi perokok masih sangat minim, maka masih dapat sedikit dimaklumi. Yang lebih ironis dan seringkali terlihat di masyarakat yakni, di area yang bebas asap rokok pun, masih ada saja yang tidak peduli pada adanya area dan aturan tersebut. (<http://www.hdindonesia.com/berita/nasib-perokok-pasif.htm>).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana opini masyarakat di Surabaya yang berusia 17-50 tahun tentang pemberitaan pada Harian Jawa Pos mengenai larangan merokok di area publik terkait berlakunya perda antirokok. Arah opini masyarakat sendiri diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu positif, netral, dan negatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori SOR, dimana teori ini Stimulus berupa pesan yaitu informasi yang terdapat di media cetak tentang berita berlakunya perda antirokok pada harian Jawa Pos, Organism yaitu penerimaan, perhatian, dan pengertian masyarakat di

Surabaya terhadap adanya stimulus tersebut, sedangkan Response dalam penelitian ini adalah opini yang timbul dari masyarakat tentang adanya berita tersebut.

Peneliti memilih Kota Surabaya sebagai objek dalam penelitian ini karena, sebagaimana diberitakan, pada tanggal 22 Oktober tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya mulai memberlakukan Perda mengenai larangan merokok di area publik/antirokok. Selain itu didukung juga dengan adanya data dari Dinkes Kota Surabaya yang menyebutkan bahwa jumlah perokok di Kota Surabaya hingga tahun 2004 berada pada kisaran persentase (63,7%). Persentase tersebut meningkat dari tahun 1994 (54,5%) dan 2001 (58,9%).

Sedangkan alasan pemilihan Jawa Pos sebagai media dalam penelitian ini karena Jawa Pos menyajikan berita tersebut secara faktual. Pada faktanya perda antirokok mulai diberlakukan di Surabaya, namun Pemkot masih terlihat belum siap. Hal tersebut dinilai melalui penyediaan infrastruktur ruangan khusus merokok yang masih minim.

Dari penelitian di atas maka judul dalam penelitian ini adalah "Opini Masyarakat Pasca Pemberitaan Berlakunya Perda Antirokok Di Surabaya Pada Harian Jawa Pos (Studi Deskriptif Tentang Opini Masyarakat Pasca Pemberitaan Berlakunya Perda Antirokok Di Surabaya Pada Harian Jawa Pos Di Surabaya)".

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Opini Masyarakat Pasca Pemberitaan Berlakunya Perda Antirokok Di Surabaya Pada Harian Jawa Pos?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Opini Masyarakat Pasca Pemberitaan Berlakunya Perda Antirokok Di Surabaya Pada Harian Jawa Pos.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ciri ilmiah pada sebuah penelitian dengan mengaplikasikan teori-teori, khususnya teori-teori komunikasi tentang pemahaman pesan yang dikemas oleh media cetak dalam hal ini surat kabar melalui opini masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah agar pihak-pihak yang tertarik dalam kajian masalah yang sama dapat mengambil manfaat, selain itu juga bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pihak yang terkait dan masyarakat luas dalam memandang permasalahan ini di tengah masyarakat.